

# **Pengawasan Lemah Dinilai Jadi Alasan Maraknya Korupsi Dana Pensiun di BUMN**

Tidak cukup di PT Jiwasraya dan PT Asabri, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengendus kasus baru di , khususnya yang terkait dana pensiun. Salah satu kasus yang telah terungkap yakni Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) milik PT Pelindo (Persero), dengan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp 148 miliar. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management FEB UI, Toto Pranoto, mengatakan sebagian besar perusahaan dana pensiun tidak mampu mengelola investasi dengan baik atau mendapatkan yang relatif rendah. "Ini bisa karena keahlian manajemen investasi yang kurang mumpuni atau bisa juga karena kondisi makro ekonomi yang tidak kondusif sehingga hasil investasi tidak optimal," kata Toto kepada kumparan, Selasa (14/3). Toto menilai ketidakmampuan pengelolaan investasi bisa disebabkan pengurus dana pensiun yang tidak profesional. Menurutnya, sebagian besar kemungkinan tidak memiliki sertifikat sebagai manajer investasi. Di sisi lain, kasus korupsi menambah catatan hitam bobroknya pengelolaan investasi di dana pensiun BUMN. Hal itu, kata Toto, disebabkan pengawasan yang lemah dari otoritas terkait. "Bisa jadi karena pengawasan yang relatif lemah. Padahal dalam struktur dana pensiun ada dewan pengawas dan mereka harus lapor juga secara reguler ke OJK. Jadi ada filter berlapis di sisi pengawasan," terang Toto. Senada, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, juga menilai rawannya kasus korupsi di dana pensiun BUMN disebabkan faktor utamanya yakni pengawasan yang lemah. "Dana itu kan dianggap dana menganggur, selama ini bobrok di manajemen pengelolaannya, jadi ini pengelolaannya memang amburadul di dana pensiun," ujar Trubus. Selain pengawasan yang lemah, Trubus menganggap payung hukum untuk mengatasi korupsi di dana pensiun masih belum maksimal. Dia meminta agar ada pembenahan internal dan penguatan regulasi ke depannya. "Selama ini sanksinya juga ringan, paling hanya dimutasi, mereka cuma disuruh mengembalikan (uang) karena UU Administrasi Pemerintahan kalau pegawai ASN dianggap maladministrasi saja," tutur Trubus. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyambangi Kejagung pada Senin (6/3),

untuk serah terima aset Jiwasraya. Pada kesempatan itu, Erick juga mengungkapkan adanya dugaan korupsi di perusahaan pelat merah. mengkonfirmasi pada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, soal kasus yang dilaporkan. "Yang jelas di bidang keuangan, nanti ya sabar," ucap Ketut Sumedana tanpa mau merinci kasusnya.